



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 1 (2025) pp: 89-96

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Antara Komitmen dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Terpencil Merauke

Martinus Wika

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro Merauke

[martinuswika202@gmail.com](mailto:martinuswika202@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil Merauke, khususnya di Distrik Okaba, serta mengungkap dinamika, tantangan, dan respons lokal terhadap kebijakan tersebut secara mendalam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi secara kontekstual pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive berdasarkan indikator seperti keterbatasan akses transportasi, minimnya guru tetap, dan rendahnya capaian pendidikan dasar. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan informan kunci (kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, tokoh masyarakat, dan orang tua), observasi partisipatif di lingkungan sekolah, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan data pendidikan daerah. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil masih terkendala oleh persoalan struktural, geografis, dan kelembagaan. Ketimpangan distribusi guru, keterbatasan infrastruktur, serta pendekatan kebijakan yang belum kontekstual menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya pelibatan masyarakat lokal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan menyebabkan intervensi pemerintah tidak efektif dan kurang berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif berbasis komunitas, penguatan kapasitas lokal, serta penyediaan sumber daya pendidikan yang memadai untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil dan inklusif di wilayah terpencil seperti Okaba, Merauke.*

*Kata kunci: Pemerataan Pendidikan, Wilayah Terpencil, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Komunitas.*

### **1. Latar Belakang**

Pemerataan pendidikan telah menjadi prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional, sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks ini, berbagai kebijakan telah dirumuskan oleh pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), distribusi guru melalui skema afirmatif, dan pembangunan sarana prasarana pendidikan, dengan tujuan mempersempit kesenjangan pendidikan antarwilayah. Khususnya di wilayah terpencil seperti Merauke, Papua Selatan, kebijakan tersebut sangat relevan mengingat tantangan geografis dan sosial yang dihadapi masyarakat setempat. Wilayah ini masih mengalami kesenjangan dalam akses pendidikan, kualitas pengajaran, dan ketersediaan fasilitas dibandingkan dengan daerah lain yang lebih berkembang.

Meskipun berbagai program telah dirancang secara normatif untuk menjamin keadilan pendidikan, implementasinya di wilayah terpencil sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Hambatan geografis seperti medan yang sulit dijangkau, transportasi terbatas, dan kondisi alam yang ekstrem menjadi penghalang utama dalam pengiriman sumber daya pendidikan, termasuk guru dan bahan ajar[1]. Di sisi lain, faktor struktural seperti ketidaksiapan lembaga pendidikan lokal, kurangnya tenaga pengajar yang terlatih, serta lemahnya sistem evaluasi dan pengawasan kebijakan, memperparah kesenjangan yang ada[2]. Bahkan ketika fasilitas fisik berhasil dibangun, tidak jarang pemanfaatannya kurang optimal akibat terbatasnya kapasitas operasional dan rendahnya pemeliharaan sarana. Lebih lanjut, aspek sosial budaya turut memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pendidikan di Merauke[3]. Tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, dan adanya perbedaan persepsi terhadap nilai pentingnya pendidikan formal menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah seringkali bersifat top-

down dan kurang mempertimbangkan konteks lokal, sehingga tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat.

Permasalahan di lapangan yang muncul dalam implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil Merauke meliputi ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan pusat dengan kondisi riil di daerah, yang tercermin dari masih terbatasnya jumlah guru berkualifikasi, rendahnya tingkat kehadiran guru, serta minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Selain itu, akses menuju sekolah sering kali sulit dijangkau karena infrastruktur transportasi yang belum memadai, ditambah dengan kurangnya dukungan dari masyarakat akibat rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal. Koordinasi antarinstansi pemerintahan juga belum optimal, sehingga distribusi bantuan pendidikan sering terlambat atau tidak tepat sasaran. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kebijakan yang seharusnya mendorong pemerataan justru belum mampu mengatasi disparitas pendidikan secara efektif di wilayah tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti tantangan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil dan perbatasan Indonesia. Kebijakan afirmatif pemerintah, seperti program pengangkatan guru daerah khusus, belum mampu mengatasi kekurangan tenaga pengajar di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) karena rendahnya retensi guru akibat kondisi kerja yang tidak mendukung[4]. Distribusi infrastruktur pendidikan di Papua cenderung tidak merata, dengan sebagian besar fasilitas hanya terpusat di wilayah kota, sedangkan daerah pedalaman mengalami ketertinggalan signifikan[5]. Selain itu, kurangnya pelibatan masyarakat lokal dan pendekatan budaya dalam kebijakan pendidikan turut menghambat efektivitas implementasi program-program pemerintah[6]. Meskipun berbagai studi telah membahas isu-isu struktural dan geografis dalam konteks pemerataan pendidikan, kesenjangan penelitian masih terlihat dalam hal pendekatan partisipatif dan kajian mendalam terhadap respons lokal terhadap kebijakan pendidikan. Banyak penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek makro atau administratif, namun belum mengungkap secara detail dinamika sosial, persepsi masyarakat, serta strategi adaptasi lokal terhadap keterbatasan pendidikan di wilayah terpencil. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih jauh bagaimana kebijakan pemerataan pendidikan dijalankan, diterima, dan direspons oleh para pelaku pendidikan dan masyarakat lokal di wilayah Merauke. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan realistis terhadap implementasi kebijakan di lapangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil seperti Merauke, yang selama ini masih menghadapi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang cukup tajam dibandingkan daerah lain. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tujuan pemerataan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini memerlukan perhatian serius agar tidak terjadi ketimpangan pendidikan yang berlarut-larut, yang pada akhirnya dapat memperparah ketidakadilan sosial dan memperlambat pembangunan sumber daya manusia di daerah 3T. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menggali dinamika lokal secara mendalam, termasuk persepsi, strategi adaptasi, dan hambatan-hambatan yang dialami langsung oleh aktor-aktor pendidikan di Merauke. Tidak hanya melihat aspek kebijakan secara normatif, penelitian ini juga menempatkan konteks sosial-budaya masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam memahami mengapa kebijakan pemerataan sering kali tidak berjalan efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur yang selama ini minim menggambarkan perspektif lokal, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil Merauke serta mengungkap dinamika, tantangan, dan respons lokal terhadap kebijakan tersebut secara mendalam.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif [7], yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil Kabupaten Merauke. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi realitas sosial dan kebijakan dari perspektif para pelaku dan penerima kebijakan di lapangan. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji secara kontekstual dan mendalam fenomena pemerataan pendidikan dalam bingkai kebijakan publik yang berlaku di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), khususnya di Merauke sebagai salah satu kabupaten paling timur Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, yang merupakan salah satu wilayah terpencil dengan keterbatasan akses geografis dan infrastruktur pendidikan. Pemilihan Distrik Okaba sebagai lokasi studi dilakukan secara purposive berdasarkan karakteristik wilayah yang menunjukkan tantangan nyata dalam

implementasi kebijakan pemerataan pendidikan. Beberapa indikator utama yang melandasi pemilihan ini mencakup keterbatasan akses transportasi [8], minimnya jumlah guru tetap, serta rendahnya capaian pendidikan dasar sebagaimana tercermin dalam data Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke dan laporan pembangunan pendidikan daerah. Kondisi ini menjadikan Distrik Okaba sebagai lokasi yang relevan untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta interaksi antara kebijakan publik dan realitas sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi [9]. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pejabat dinas pendidikan, tokoh masyarakat, serta orang tua siswa. Teknik ini bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka terkait pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan [10]. Menurut [11] observasi dilakukan di lingkungan sekolah untuk melihat langsung kondisi sarana prasarana, proses belajar mengajar, dan dinamika sosial pendidikan di lokasi. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji kebijakan, laporan tahunan, serta data pendidikan yang relevan guna memperkuat triangulasi data.

Dalam menganalisis data, menurut [12] penelitian ini menggunakan pendekatan analisis interaktif dari yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setiap informasi yang diperoleh dari lapangan dikategorisasi dan dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari data empiris, seperti distribusi guru, akses sarana, partisipasi masyarakat, dan tantangan pelaksanaan kebijakan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarkomponen dalam implementasi kebijakan secara sistematis.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, dilakukan teknik triangulasi sumber dan metode [13], serta member checking. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Member checking dilakukan dengan meminta konfirmasi dari informan kunci terhadap interpretasi data dan temuan awal, guna meminimalkan bias dan kesalahan persepsi. Selain itu, catatan lapangan dan hasil wawancara dianalisis secara reflektif dan berulang guna menjaga konsistensi dan kedalaman analisis.

### 3. Hasil dan Diskusi

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pengalaman para aktor pendidikan termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan pejabat lokal dalam menghadapi keterbatasan akses, sarana, dan sumber daya manusia. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara komitmen kebijakan dan realita pelaksanaannya di lapangan. Berikut ini merupakan paparan hasil penelitian berdasarkan kategori tematik utama yang ditemukan selama proses pengumpulan data.

Tabel 1. Ketimpangan Distribusi Guru dan Fasilitas Pendidikan

Aspek yang Dianalisis	Temuan Rinci
Rasio Guru–Siswa	Tinggi, banyak kelas diajar satu guru untuk semua mata pelajaran
Status Kepegawaian	Mayoritas guru berstatus honorer dengan insentif tidak menentu
Kehadiran Guru	Tidak stabil, terhambat akses transportasi dan minimnya motivasi kerja
Kondisi Bangunan Sekolah	Banyak sekolah rusak berat dan tidak layak digunakan
Sarana Pembelajaran	Kekurangan buku teks, alat peraga, dan media digital
Akses Air dan Sanitasi Sekolah	Minim, berdampak pada kesehatan dan kenyamanan belajar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi guru dan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil Merauke, khususnya Distrik Okaba, menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemerataan pendidikan. Rasio guru–siswa sangat tidak proporsional, dengan banyak kelas yang diajar oleh satu guru untuk berbagai mata pelajaran, sehingga menurunkan kualitas pembelajaran. Sebagian besar guru berstatus honorer dengan insentif yang tidak menentu, yang berdampak pada rendahnya motivasi dan stabilitas kehadiran mereka di sekolah. Faktor geografis yang sulit dijangkau memperburuk situasi, mengakibatkan absensi guru yang tinggi. Dari segi infrastruktur, banyak bangunan sekolah mengalami kerusakan berat dan tidak memenuhi standar kelayakan, serta minimnya sarana pembelajaran seperti buku teks, alat peraga, dan media digital. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di lingkungan sekolah sangat terbatas, yang secara langsung memengaruhi kenyamanan dan kesehatan peserta didik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang perlu segera diatasi melalui kebijakan afirmatif dan dukungan logistik yang berkelanjutan dari pemerintah.

Tabel 2. Minimnya Supervisi dan Monitoring Pemerintah Daerah

Aspek yang Dianalisis	Temuan Rinci
Frekuensi Supervisi	Sangat jarang, tidak terjadwal secara rutin karena keterbatasan biaya

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.376>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pelaporan dan Evaluasi Sekolah	Hanya formalitas, tidak mencerminkan kualitas pembelajaran
Dukungan Operasional	Minim pendampingan teknis dan pelatihan oleh Dinas Pendidikan
Aksesibilitas Pegawai Dinas	Sulit menjangkau sekolah-sekolah pedalaman, khususnya di musim ekstrem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi pendidikan di wilayah terpencil seperti Distrik Okaba masih sangat terbatas. Frekuensi supervisi oleh Dinas Pendidikan berlangsung sangat jarang dan tidak memiliki jadwal yang konsisten, terutama karena keterbatasan anggaran operasional. Pelaporan dan evaluasi sekolah yang dilakukan pun cenderung bersifat administratif semata, tidak mencerminkan kondisi riil mutu pembelajaran. Selain itu, dukungan teknis dari dinas, seperti pelatihan guru dan pendampingan kurikulum, hampir tidak tersedia, sehingga guru di daerah terpencil dibiarkan bekerja tanpa arahan yang memadai. Aksesibilitas pegawai dinas untuk mengunjungi sekolah-sekolah pedalaman juga menjadi tantangan besar, terutama saat kondisi cuaca ekstrem yang membuat transportasi darat maupun air sulit dilakukan. Keterbatasan ini secara keseluruhan berdampak negatif terhadap kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil.

Tabel 3. Keterbatasan Kapasitas Guru dalam Konteks Multikultural

Aspek yang Dianalisis	Temuan Rinci
Pemahaman Konteks Sosial-Budaya	Guru luar daerah kesulitan memahami budaya dan bahasa lokal
Strategi Pengajaran Kontekstual	Minim, karena tidak ada pelatihan berbasis kearifan lokal
Bahasa Pengantar Pembelajaran	Tidak ramah bagi siswa yang belum fasih berbahasa Indonesia
Integrasi Nilai Adat dalam Kurikulum	Hampir tidak ada karena kurikulum bersifat generik nasional

Tabel ini menunjukkan bahwa kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran di wilayah multikultural seperti Distrik Okaba masih sangat terbatas. Banyak guru yang berasal dari luar daerah mengalami kesulitan dalam memahami budaya lokal serta bahasa yang digunakan sehari-hari oleh siswa, sehingga terjadi jarak sosial antara guru dan peserta didik. Strategi pengajaran yang bersifat kontekstual juga minim karena belum ada pelatihan yang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam proses belajar mengajar. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sering kali menjadi hambatan, terutama bagi siswa yang belum fasih, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Kurikulum yang digunakan pun bersifat generik nasional tanpa penyesuaian terhadap nilai-nilai adat setempat, yang mengakibatkan kurangnya relevansi materi pelajaran dengan kehidupan dan identitas budaya siswa.

Tabel 4. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pendidikan

Aspek yang Dianalisis	Temuan Rinci
Keterlibatan Orang Tua	Rendah, beberapa orang tua belum menganggap sekolah sebagai kebutuhan utama
Persepsi terhadap Pendidikan	Pendidikan formal dianggap kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari
Hubungan Sekolah-Komunitas	Belum terbangun secara kolaboratif dan partisipatif
Peran Tokoh Adat dan Gereja	Minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan pendidikan

Partisipasi masyarakat lokal dalam pendidikan di wilayah terpencil seperti Distrik Okaba masih menghadapi tantangan signifikan. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan tergolong rendah karena sebagian besar masih memandang sekolah bukan sebagai kebutuhan utama, melainkan sekadar pelengkap kehidupan adat yang berbasis subsistensi. Persepsi terhadap pendidikan formal pun cenderung pragmatis; banyak yang menilai bahwa materi sekolah kurang relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari di kampung. Hubungan antara sekolah dan komunitas belum terjalin secara kolaboratif dan partisipatif, sehingga sekolah sering berjalan sendiri tanpa dukungan atau keterlibatan aktif dari warga. Selain itu, peran tokoh adat dan gereja sebagai figur yang dihormati dalam komunitas juga belum dioptimalkan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan, sehingga ruang dialog antara sistem pendidikan formal dan nilai-nilai lokal menjadi terbatas.

Tabel 5. Ketidaksesuaian antara Kebijakan dan Realita Lapangan

Desain Kebijakan Pendidikan	Tidak adaptif terhadap tantangan geografis dan sosial-budaya lokal
Alokasi Anggaran dan Bantuan	Sering terlambat, tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan sekolah
Sentralisasi Kebijakan	Kebijakan berasal dari pusat tanpa masukan dari daerah
Ketimpangan Akses Informasi	Sekolah terpencil kurang mendapat informasi terbaru tentang program pusat

Tabel 5 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan pendidikan dengan realitas lapangan di wilayah terpencil seperti Distrik Okaba. Desain kebijakan yang bersifat seragam dan tidak mempertimbangkan kondisi geografis serta sosial-budaya setempat menyebabkan kebijakan tersebut sulit diimplementasikan secara efektif. Alokasi anggaran dan bantuan pendidikan juga sering mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil sekolah, seperti perbaikan infrastruktur atau pelatihan guru. Selain itu, pola sentralisasi kebijakan

dari pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal menimbulkan ketimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah terpencil kurang mendapat informasi terkini mengenai program-program pendidikan nasional, sehingga semakin tertinggal dari sisi inovasi maupun intervensi kebijakan.

Paradoks antara komitmen pemerataan pendidikan dan realitas ketimpangan di wilayah terpencil seperti Distrik Okaba merupakan representasi nyata dari kesenjangan antara kebijakan nasional dan kondisi lokal. Pemerintah pusat melalui berbagai regulasi dan program seperti Wajib Belajar 12 Tahun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, serta penempatan Guru Daerah Khusus telah menegaskan komitmen untuk memastikan akses pendidikan dasar yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Namun, dalam praktiknya, [14] temuan di lapangan menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di daerah terpencil. Di Okaba, distribusi guru menjadi tantangan utama. Banyak sekolah dasar yang hanya memiliki satu guru untuk mengajar semua kelas, bahkan dalam beberapa kasus, guru harus merangkap sebagai kepala sekolah dan petugas administrasi [15]. Kondisi ini diperburuk dengan tingginya tingkat mobilitas guru dan ketidakhadiran yang kronis, sebagian besar disebabkan oleh minimnya insentif kerja dan buruknya akses transportasi. Situasi ini menciptakan ketimpangan serius dalam kualitas pembelajaran dan keberlangsungan proses pendidikan.

Lebih jauh, minimnya infrastruktur fisik seperti ruang kelas yang memadai, sanitasi yang layak, serta ketiadaan listrik dan akses internet menghambat implementasi kurikulum yang berbasis digital dan interaktif. Beberapa sekolah bahkan harus menggunakan rumah warga atau bangunan seadanya untuk kegiatan belajar-mengajar. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap rendahnya mutu pendidikan dan rendahnya angka partisipasi [16] sekolah, khususnya pada jenjang lanjutan. Secara normatif, kebijakan pendidikan nasional menjunjung prinsip inklusivitas dan keadilan, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa wilayah seperti Okaba justru terjebak dalam siklus ketertinggalan yang sistemik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat seragam dan sentralistik tidak cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Diperlukan reformulasi pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan adaptif terhadap karakteristik geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat [17]. Dengan demikian, [18] temuan ini menekankan pentingnya membangun mekanisme kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada angka capaian nasional, tetapi juga benar-benar memahami kebutuhan nyata di akar rumput. Hal ini termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kesejahteraan dan pelatihan guru di daerah terpencil [19], serta investasi berkelanjutan dalam infrastruktur pendidikan. Tanpa pergeseran paradigma ini, komitmen pemerataan akan terus terjebak pada level retorika, sementara ketimpangan pendidikan tetap menjadi realitas sehari-hari bagi masyarakat di Distrik Okaba dan wilayah-wilayah sejenisnya.

Kendala struktural dan geografis merupakan tantangan utama dalam implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil seperti Distrik Okaba. Secara geografis, menurut [20] wilayah ini berada dalam kondisi yang relatif terisolasi, sedangkan [21] akses transportasi di daerah tersebut masih sangat terbatas, baik dari segi sarana maupun infrastruktur jalan yang memadai. Ketergantungan terhadap moda transportasi tradisional seperti perahu dan jalur darat yang tidak stabil menyebabkan distribusi logistik Pendidikan termasuk buku, alat peraga, serta perlengkapan belajar—sering mengalami keterlambatan atau bahkan gagal tiba di lokasi tujuan [22]. Hal ini menghambat kelancaran proses belajar-mengajar, khususnya di awal tahun ajaran. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap teknologi dan jaringan internet menambah kompleksitas hambatan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di wilayah ini. Ketika kebijakan nasional mulai mendorong digitalisasi pendidikan dan penggunaan platform daring sebagai bagian dari sistem pembelajaran, banyak sekolah di Okaba yang tidak memiliki infrastruktur dasar seperti listrik yang stabil dan perangkat teknologi memadai. Akibatnya, siswa dan guru di wilayah ini tidak dapat merasakan manfaat langsung dari program digitalisasi pendidikan yang digagas secara nasional, menciptakan jurang ketimpangan digital yang semakin melebar.

Infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan sanitasi dasar pun masih menjadi permasalahan serius [23]. Banyak sekolah yang mengalami kerusakan permanen akibat kondisi alam, dan tidak mendapatkan alokasi anggaran pemeliharaan secara rutin. Beberapa sekolah bahkan belum memiliki bangunan permanen, dan masih menggunakan tempat ibadah atau rumah warga sebagai tempat belajar [24]. Situasi ini memperburuk kualitas pembelajaran serta berdampak pada partisipasi dan motivasi siswa untuk terus bersekolah. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dengan realitas geografis dan struktural wilayah-wilayah 3T. Kebijakan yang bersifat top-down, tanpa fleksibilitas dalam pengalokasian sumber daya dan strategi implementasi yang kontekstual, menyebabkan ketimpangan terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan pendidikan yang responsif terhadap karakteristik geografis lokal, termasuk penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung infrastruktur dasar, serta pelibatan

masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah terpencil seperti Okaba.

Kelemahan desain dan adaptasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal menjadi salah satu akar dari stagnasi program pemerataan di wilayah terpencil seperti Distrik Okaba. Kebijakan pendidikan yang dirancang secara sentralistik oleh pemerintah pusat sering kali mengabaikan kompleksitas lokal [25], baik dari aspek geografis, sosial-budaya, maupun kapasitas kelembagaan daerah [26]. Model kebijakan yang bersifat seragam dan tidak kontekstual menjadikan program-program nasional seperti pengiriman guru, penyediaan sarana belajar, hingga pelatihan tenaga kependidikan tidak mampu beradaptasi dengan realitas lapangan yang penuh keterbatasan. Di Distrik Okaba, misalnya, pengiriman guru melalui skema rekrutmen nasional kerap tidak mempertimbangkan aspek kesiapan individu dalam menghadapi kondisi geografis ekstrem dan keterbatasan fasilitas hidup. Hal ini menyebabkan angka ketidakhadiran guru tinggi, atau bahkan munculnya fenomena guru siluman yang hanya tercatat secara administratif namun tidak hadir secara fisik di sekolah. Akibatnya, keberadaan program peningkatan mutu pendidikan menjadi tidak optimal dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan siswa.

Selain itu, minimnya fleksibilitas kebijakan menyebabkan intervensi pendidikan dari pusat cenderung tidak relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat lokal. Misalnya, kurikulum yang diimplementasikan tidak memberi ruang yang cukup bagi muatan lokal dan pendekatan berbasis konteks budaya, padahal masyarakat adat di wilayah seperti Okaba memiliki tradisi dan bahasa sendiri yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Intervensi seperti pelatihan guru pun sering tidak mempertimbangkan latar belakang pedagogis yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di daerah terpencil. Ketidaksesuaian ini memperlihatkan pentingnya desentralisasi kebijakan pendidikan yang bukan hanya administratif, tetapi juga substantif. Artinya, kebijakan harus memberikan otonomi yang lebih besar bagi daerah untuk merancang dan menyesuaikan program pendidikan berdasarkan tantangan dan potensi lokal. Perlu adanya ruang partisipasi yang lebih besar bagi aktor-aktor lokal, termasuk guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Pendidikan [27]. Pendekatan ini dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan, serta memperkuat keberlanjutan upaya pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.

Rendahnya Kapasitas SDM dan Minimnya Pelatihan Guru menjadi tantangan utama dalam implementasi pendidikan yang inklusif dan relevan di wilayah terpencil seperti Distrik Okaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas guru yang ditempatkan tidak memiliki pengalaman atau pelatihan yang memadai dalam menghadapi konteks sosial-budaya setempat. Pelatihan yang bersifat teknis dan seragam dari pusat gagal menjawab kebutuhan spesifik daerah, khususnya dalam aspek multikulturalisme dan pedagogi berbasis budaya lokal. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, terutama dalam menyampaikan materi yang dapat dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak adat. Lebih jauh, keterbatasan tenaga pendidik lokal memperburuk keberlangsungan proses belajar-mengajar. Banyak sekolah bergantung pada guru kontrak yang tidak menetap secara permanen, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak konsisten. Kekosongan pengajar dalam jangka waktu tertentu menyebabkan anak-anak kehilangan momentum belajar, yang pada akhirnya berdampak pada capaian akademik mereka [28]. Tanpa kehadiran guru yang memahami bahasa, kebiasaan, dan nilai-nilai lokal, pendidikan kehilangan maknanya sebagai proses pemberdayaan.

Di sisi lain, Pentingnya Pendekatan Partisipatif dan Berbasis Komunitas muncul sebagai temuan kunci dalam penelitian ini. Keterlibatan orang tua, tokoh adat, dan komunitas lokal terbukti meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sekolah dan proses pendidikan. Misalnya, dukungan orang tua dalam kegiatan belajar, penyediaan pangan lokal untuk siswa, serta pengawasan terhadap kehadiran guru menunjukkan bahwa pendidikan dapat dibangun secara kolektif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat relasi sosial di sekitar sekolah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan dijalankan sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat. Revitalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan sekolah menjadi strategi penting untuk mendorong keberlanjutan. Model pengelolaan sekolah yang terbuka terhadap partisipasi komunitas memungkinkan terjadinya dialog antara nilai-nilai formal pendidikan nasional dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat [29]. Oleh karena itu, transformasi pendidikan di wilayah terpencil tidak cukup hanya melalui intervensi struktural, tetapi juga menuntut pembaruan pendekatan yang bersumber dari kekuatan sosial budaya komunitas itu sendiri.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil masih menghadapi berbagai tantangan struktural, geografis, dan kelembagaan. Meskipun secara normatif kebijakan pemerintah menunjukkan komitmen terhadap pemerataan akses dan kualitas pendidikan, realitas di

lapangan menunjukkan ketimpangan yang signifikan, khususnya dalam distribusi tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan dukungan administratif. Keterisolasian wilayah, minimnya transportasi, serta kurangnya pelatihan dan dukungan bagi guru memperburuk kualitas pembelajaran dan menurunkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, kebijakan yang bersifat top-down dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks lokal menyebabkan intervensi pendidikan kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas, dengan mengakui peran penting masyarakat lokal, tokoh adat, dan orang tua dalam mendukung proses pendidikan. Penguatan kapasitas lokal, adaptasi kebijakan yang kontekstual, serta penyediaan fasilitas dan tenaga pendidikan yang memadai menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pemerataan pendidikan yang adil dan inklusif di wilayah terpencil seperti Okaba.

## Referensi

- [1] A. Nordian, "Strategi Efektif Mengatasi Tantangan Pendidikan Islam di Daerah Terpencil untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas," *At-tadris J. Educ. Res.*, vol. 3, no. 1, pp. 60–80, 2024.
- [2] N. Dahyanti, S. M. Diastami, A. Humaira, and T. Darmansah, "Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia," *Hikmah J. Stud. Pendidik. Agama Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 87–100, 2025.
- [3] A. Risdianto and F. M. Jotham, "Analisis Implementasi Kebijakan "Food Estate" Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah," *J. Kaji. Agrar. Dan Kedaulatan Pangan*, vol. 3, no. 1, pp. 50–59, 2024.
- [4] M. A. Kurniawan, "KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN GURU DI DAERAH 3 T (TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL) DALAM PRESPEKTIF PEMANFAATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA ISLAM," *Al-Wathan J. Ilmu Syariah*, vol. 3, no. 01, pp. 87–109, 2022.
- [5] I. N. Sudira, C. Pamungkas, F. Adulsyah, E. Rumkambu, and Y. Langowuyo, "Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua," *Jakarta, Imparsial*, 2021.
- [6] H. Firdaus, N. Nursaida, and S. Subiyantoro, "Analisis Hambatan dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs Tarbiyatus Shiblyan Wal Banat Berdasarkan Pendekatan TQM," *Tafhim Al-'Ilmi*, vol. 16, no. 02, pp. 263–285, 2025.
- [7] S. Klingberg, R. E. Stalmeijer, and L. Varpio, "Using framework analysis methods for qualitative research: AMEE Guide No. 164," *Med. Teach.*, vol. 46, no. 5, pp. 603–610, 2024.
- [8] S. Moslem, "A novel parsimonious spherical fuzzy analytic hierarchy process for sustainable urban transport solutions," *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 128, p. 107447, 2024.
- [9] E. N. Purnomo, A. Imron, B. B. Wiyono, A. Y. Sobri, and Z. A. Dami, "Transformation of digital-based school culture: Implications of change management on virtual learning environment integration," *Cogent Educ.*, vol. 11, no. 1, p. 2303562, 2024.
- [10] A. Bressane *et al.*, "Understanding the role of study strategies and learning disabilities on student academic performance to enhance educational approaches: A proposal using artificial intelligence," *Comput. Educ. Artif. Intell.*, vol. 6, p. 100196, 2024.
- [11] İ. Kandemir and E. Akdemir, "Ensuring Sustainability in Preschool Education in Rural Areas During the Pandemic Lockdown Period: Teachers' Experiences," *Sustainability*, vol. 17, no. 1, p. 352, 2025.
- [12] P. Onu, A. Pradhan, and C. Mbohwa, "Potential to use metaverse for future teaching and learning," *Educ. Inf. Technol.*, vol. 29, no. 7, pp. 8893–8924, 2024.
- [13] X. Huang, R. Xu, W. Yu, and S. Wu, "Impact Localization in Complex Cylindrical Shell Structures Based on the Time-Reversal Virtual Focusing Triangulation Method," *Sensors*, vol. 24, no. 16, p. 5185, 2024.
- [14] C. Benski *et al.*, "Technological innovation in international training and advancing health services: two cases during the COVID-19 pandemic," *Heal. Syst. Reform*, vol. 10, no. 2, p. 2387646, 2024.
- [15] M. Procopio, R. Fernández-Cézar, L. Fernandes-Procopio, and B. Yáñez-Araque, "Neuroscience-based information and communication technologies development in elementary school mathematics through games: A case study evaluation," *Educ. Sci.*, vol. 14, no. 3, p. 213, 2024.
- [16] J. T. Downer *et al.*, "Coaching and coursework focused on teacher–child interactions during language/literacy instruction: Effects on teacher outcomes and children's classroom engagement," *Early Educ. Dev.*, vol. 35, no. 5, pp. 1032–1062, 2024.
- [17] I. Macaione, A. Raffa, and B. Andaloro, "Climate-Adaptive Nature-Based Regenerative Urban Green Streetscapes: Design Exploration from the City of Matera," *Sustainability*, vol. 16, no. 16, p. 6811, 2024.
- [18] S. Jang, "Capital mechanisms driving parental activism in South Korea: Perspectives from parentocracy, meritocracy, and a Bourdieusian analysis of capital," *Int. J. Educ. Dev.*, vol. 109, p. 103104, 2024.
- [19] E. M. Lim, "The Relationships Among Teacher's Self-Efficacy, Teacher–Child Interaction, and Peer Interaction Based on Young Children's Emotional Intelligence," *Asia-Pacific Educ. Res.*, vol. 33, no. 5, pp. 1237–1249, 2024.
- [20] B. Wu *et al.*, "Temporal trends of breast cancer burden in the Western Pacific Region from 1990 to 2044: Implications from the Global Burden of Disease Study 2019," *J. Adv. Res.*, vol. 59, pp. 189–199, 2024.
- [21] S. Livraghi, M. Peretto, D. Papantonis, and M. F. Oprea, "Rethinking Energy–Transport Poverty: An Indicator for Vulnerable Rural EU Regions," *Sustainability*, vol. 17, no. 6, p. 2577, 2025.

- [22] J. E. Bosch, K. Olioumtsevs, S. A. A. Santarelli, F. Foppolo, F. Faloppa, and D. Papadopoulou, "Teaching L2 Learners During a Pandemic; A Cross-Country Investigation of Teachers' Challenges and Needs," in *Multilingualism and Multiculturalism in Language Education*, Springer, 2025, pp. 253–276.
- [23] A. O. Adewusi and J. A. Oguntokun, "Accessibility of Public Conveniences by Students in Higher Education Institutions," in *Facility Management Practices: Empirical Cases in Developing Countries*, Springer, 2024, pp. 81–97.
- [24] A. J. Wahab *et al.*, "A theological approach to the construction of houses of worship in Indonesia," *Cogent Soc. Sci.*, vol. 10, no. 1, p. 2356914, 2024.
- [25] S. Kuhlmann, J. Franzke, N. Peters, and B. P. Dumas, "Institutional designs and dynamics of crisis governance at the local level: European governments facing the polycrisis," *Policy Des. Pract.*, vol. 7, no. 4, pp. 409–429, 2024.
- [26] B. Tabak *et al.*, "Economic and Socio-Cultural Development Dimension—Two Lake-Protected Areas' Sustainability: A Case of Hungary and Serbia," *Land*, vol. 14, no. 3, p. 479, 2025.
- [27] G. Al-Thani, "Comparative analysis of stakeholder integration in education policy making: case studies of Singapore and Finland," *Societies*, vol. 14, no. 7, p. 104, 2024.
- [28] C. G. Mokher, T. J. Park-Gaghan, and S. Hu, "Can a developmental education reform promote momentum to mid-term and longer-term student success? Evidence from Florida," *J. Res. Educ. Eff.*, vol. 17, no. 4, pp. 806–835, 2024.
- [29] M. Rahmah and A. Sulistyono, "The integration of traditional knowledge and local wisdom in mitigating and adapting climate change: Different perspectives of indigenous peoples from Java and Bali Island," in *Traditional knowledge and climate change: An environmental impact on landscape and communities*, Springer, 2024, pp. 61–80.